

Sampaikan LKPD Unaudited, Bupati Irna WTP Sebuah Kewajiban

Farid Padlani - LEBAK.DEMOKRAT.CO.ID

Mar 22, 2024 - 16:46



Lebak, Publik Banten id Pandeglang - Pemerintah Kabupaten Pandeglang menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited tahun 2023 ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) perwakilan Provinsi Banten. Bupati Pandeglang Irna Narulita mengharapkan pandeglang kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Alhamdulillah kami sudah meraih predikat WTP kurang lebih 6 kali berturut-turut,

semoga bisa WTP kembali karena WTP adalah sebuah kewajiban," hal demikian dikatakan Bupati Irna Narulita saat menyerahkan LKPD unaudited ke BPKRI Perwal Banten di Serang, Jumat (22/3/2024).

Menurut Bupati Irna, dalam penyajian laporan keuangan diakui masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu pihaknya berharap terus mendapat pendampingan dari jajaran BPK.

"Terus dampingi kami, kami juga banyak kekurangan, apa yang menjadi catatan sebelumnya sudah kami tindaklanjuti," katanya.

Dikatakan Bupati Irna, pandangan dan arahan tim BPK sangat penting bagi Pemerintah Daerah agar dalam melaksanakan perencanaan serta pengelolaan keuangan bisa lebih baik.

"Arahan ini akan memotivasi kami, WTP ini tanggung jawab yang kami emban dan kami sampaikan kepada masyarakat karena anggaran yang digunakan adalah uang rakyat,"pungkasnya.

Sementara Kepala BPK Perwal Banten Dede Sukarjo mengatakan, dengan diserahkannya LKPD, pengelolaan keuangan Pemerintah Pandeglang menunjukkan sudah selesai dalam pengelolaan keuangan.

"Kami ucapkan terimakasih bupati sudah menyampaikan langsung, kami apresiasi setingginya sudah menyampaikan LKPD tepat waktu,"terangnya.

Menurut kepala BPK Perwal Banten, pihaknya juga memiliki waktu terbatas setelah LKPD diserahkan kepada BPK oleh Pemerintah Daerah.

"Penyampaian LHP dua bulan dari sejak hari ini, kitapun harus tepat waktu menyampaikan kepada pemda dan dprd," ujarnya.

Dikatakannya, proses selanjutnya setelah LKPD diserahkan, tim BPK akan turun kembali untuk melakukan pemeriksaan terinci selama 30 hari.

"Setelah pemerikaan terinci akan kami serahkan kembali, jika ada catatan atau ketidak akuratan akan disampaikan lebih awal untuk dilakukan tindaklanjut," pungkasnya.

Dalam penyerahan LKPD tahun 2023, Bupati Irna didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pandeglang Ali Fahmi Sumanta, Assisten Administrasi Umum Setda Kurnia Satriawan, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Yahya Gunawan Kasbin, Inspektur Inspektorat Hasan Bisri, Kepala Bagian Prokopim.

(Tim media*Red)